

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI SMK NEGERI 1 KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU

Yusianie Mersie

SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Jln. Mantaren I, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
e-mail: yusianimersi@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze (1) the effect of communication, resource, bureaucratic structure on the disposition policies (4) the effect of communication, resources, bureaucratic structure, and policy disposition on the provision of teacher professional allowance in SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Pulang Pisau regency. This research was designed as an explanatory research. The model used is the path analysis model. The population is the entire teachers in SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Regency Pulang Pisau amounted to 54 people with a sample technique saturated i.e., 54 people. Data collection is conducted by distributing questionnaires, documentation and observation. The result of the research shows that: (1) there are significant effects of communication, resource, bureaucracy structure on disposition policies, and (2) there are significant effects of communication, resources, bureaucratic structure, and disposition on teacher profession allowance policies implementations.

Keywords: *communication, resources, bureaucratic structure, disposition, teacher professional allowance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap disposisi (2) pengaruh komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi kebijakan terhadap pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini dirancang sebagai *explanatory research*. Model yang dipakai adalah model analisis jalur. Populasi adalah seluruh guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 54 orang dengan teknik sampel jenuh yaitu 54 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh signifikan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi terhadap disposisi implementasi kebijakan menunjukkan, dan (2) terdapat pengaruh signifikan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru.

Kata Kunci: *komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi, tunjangan profesi guru*

Latar Belakang

Permasalahan lain terkait dengan efektifitas program sertifikasi terhadap peningkatan kualitas guru. Program uji sertifikasi yang tengah dijalankan pemerintah saat ini hanya mengandalkan penilaian portofolio (Sugiharto, 2006) menyatakan bahwa model portofolio tidak memungkinkan tim asesor

untuk memeriksa langsung proses pembelajaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan penilaian lebih menekankan pada logika keteraturan perencanaan pembelajaran daripada realitas pelaksanaannya. Kemungkinan guru yang lebih cerdas merancang pelaksanaan pembelajaran skornya lebih tinggi dibanding dengan mereka yang lebih rajin mengajar.

Bagi guru lulusan D-2 dan D-3 harus menempuh dua sampai tiga tahun pendidikan, yang harus dimulai dari awal kuliah yang penyelesaiannya bisa mencapai dua sampai tiga tahun. Terlepas dari berbagai permasalahan seputar implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, pada hakekatnya implementasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas pula. Program sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai cara memberikan tunjangan profesi, tetapi sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dari berbagai model implementasi kebijakan yang dikemukakan beberapa ahli, ada lima faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan kondisi sosial ekonomi. Kondisi guru menjadi menarik dan layak untuk diteliti karena jumlah guru SD yang sudah berijazah S-1 lebih dari 30% (sekitar 1.105 guru) dari keseluruhan jumlah guru berijazah S-1 termasuk di SMK Negeri Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah 30% ini sangat jauh dibandingkan dengan prosentase nasional jumlah guru SMK berkualifikasi S-1 dari keseluruhan guru berijazah S-1 Indonesia yaitu 50,6% (sekitar 602 guru). Hal menarik lain adalah kuota guru SMK yang mendapat sertifikat guru juga cukup besar dibandingkan guru SMA umumnya. Pada tahun 2016 Kabupaten Pulang Pisau memberikan kuota kepada 20 guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir untuk mengikuti sertifikasi. Jumlah itu terdiri dari guru yang memiliki ijazah strata 1 (S-1) dengan status 19 orang PNS dan 1 Non PNS.

Komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir dilakukan pada saat sosialisasi, pengumpulan berkas portofolio maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir, sebelumnya diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana sertifikasi guru menyebabkan sosialisasi sertifikasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir tidak mudah. Strategi yang digunakan untuk memudahkan

sosialisasi perlu mendapat pengkajian lebih baik.

Pelaksanaan sertifikasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir dibentuk struktur organisasi pelaksana dengan mengacu pada buku pedoman. Kinerja semua komponen dalam struktur organisasi ini harus maksimal karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Terkait kondisi sosial maka status sosial kebanyakan guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir mampu mendukung pelaksanaan sertifikasi guru. Para guru SMK tersebut memiliki status sosial setara dengan tokoh-tokoh formal dan informal yang berada di sekolah. Mereka merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa sehingga banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Program sertifikasi bagi guru SD ini juga memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan bagi para guru yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kesejahteraan yang meningkat maka guru diharapkan akan lebih konsentrasi pada tugasnya sebagai pendidik.

Hal-hal tersebut merupakan gambaran awal dari penelitian tentang implementasi sertifikasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir ini. Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan sertifikasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan kerja guru tersebut.

Pemberian tunjangan profesi guru sendiri, bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru yang profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan UU No 14 Tahun 2005 mengenai tunjangan profesi guru. Diharapkan tunjangan tersebut dapat mendorong dan memotivasi guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara profesional dan tetap konsisten pada tugasnya sebagai guru. Tunjangan profesi guru juga diharapkan bisa meningkatkan citra, harga diri dan martabat, rasa hormat, dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menemui permasalahan yang cukup kompleks yakni sebagai berikut ini.

1. Pandangan guru terhadap uji profesi yang dilaksanakan sekarang ini masih belum cukup memadai karena hal tersebut masih tidak dipahami sepenuhnya.
2. Pendapat guru terhadap proses sertifikasi yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda pula.
3. Persepsi dari guru yang sudah disertifikasi memiliki kemampuan yang sangat berbeda dibandingkan yang belum disertifikasi dengan alasan bagi yang sudah disertifikasi memiliki banyak kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang kaitannya dengan uji profesi.

Guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memaksimalkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada dan melakukan berbagai inovasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi menarik sehingga para siswa tidak bosan dengan performa guru dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan penilaian para guru dan kepala sekolah di lokasi di mana para guru sudah mendapat sertifikat pendidik profesional belum ada peningkatan yang berarti berkaitan dengan keprofesionalan dalam proses belajar mengajar di kelas.

Inovasi, metode, improvisasi pembelajaran masih monoton dan konvensional. Kendala yang dihadapi adalah dari dalam diri para guru sendiri, misalnya usia guru yang sudah tua dan mau pensiun, dan kemampuan guru untuk mengembangkan metode dan inovasi pembelajaran, walaupun pihak sekolah sudah mencoba memfasilitasi para guru untuk melakukan terobosan pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kompetensi guru dalam pembelajaran meliputi penguasaan empat bidang kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan melalui uji kompetensi. Sejak kebijakan sertifikasi dilaksanakan (diimplementasikan), banyak pendidik yang memperoleh sertifikat pendidik, sebagai bentuk pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Masalah yang timbul yaitu pada penetapan kuota oleh pemerintah tidak sebanding dengan jumlah guru yang akan disertifikasi, padahal banyak guru yang sudah memenuhi persyaratan sertifikasi. Berdasarkan latar be-

lakang masalah maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini.

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
2. Apakah sumber daya berpengaruh terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
3. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
4. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
5. Apakah sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
6. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
7. Apakah disposisi kebijakan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?

Kajian Literatur

Carl Friedrich dalam Wahab (2011:3) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pada hakikatnya, studi tentang kebijakan (*policy*) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan dilihat dari faktor; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Webster dalam Wahab (2011:64) menyatakan bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksa-

nakan sesuatu; menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden). Implementasi kebijakan sertifikasi guru merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan taraf hidup guru yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Edward III (1980) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Edward III (1980) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tunjangan profesi guru bersifat tetap - selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru. Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma

empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

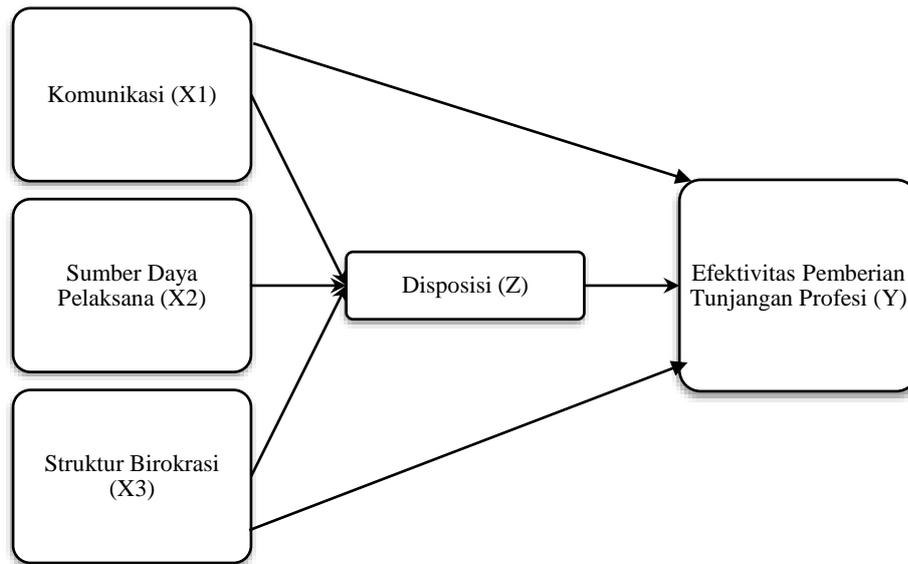
Kerangka pikir penelitian digambarkan pada Gambar 1.

Sesuai dengan anggapan dasar yang dikemukakan pada kerangka pikir penelitian, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Terdapat pengaruh komunikasi terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
2. Terdapat pengaruh sumber daya terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
3. Terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
4. Terdapat pengaruh komunikasi terhadap implementasi pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
5. Terdapat pengaruh sumber daya terhadap implementasi pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
6. Terdapat pengaruh struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
7. Terdapat pengaruh disposisi kebijakan terhadap implementasi pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai *explanatory research*. Adapun model yang dipakai adalah model analisis jalur. Populasi adalah seluruh guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 54 orang dengan teknik sampel jenuh yaitu 54 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner, dokumentasi dan observasi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Regresi antar variabel eksogen terhadap variabel endogen berdasarkan hasil output SPSS adalah dijabarkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Dari Tabel 2, nilai 18.044 dengan signifikansi F test sebesar 0,000 (<0,05), maka hipotesis nol ditolak dalam artian secara keseluruhan komunikasi dan sumber daya mempunyai hubungan linear terhadap disposisi. Kedua variabel tersebut signifikan mempengaruhi disposisi. Secara bersama kedua variabel mampu menjelaskan variabel disposisi sebesar 58.8 %. (nilai R square).

Dari uji hipotesis secara individu diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi mempunyai pengaruh karena dalam taraf signifikan melebihi 0,05 terhadap disposisi di mana besarnya pengaruh adalah 0,116.

2. Sumber daya mempunyai pengaruh karena dalam taraf signifikan melebihi 0,05 terhadap disposisi di mana besarnya pengaruh adalah 0,222.
3. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh pula karena dalam taraf signifikan melebihi 0,05 terhadap disposisi di mana besarnya pengaruh adalah 0,664, yang artinya pengaruhnya lebih besar dibandingkan komunikasi dan sumber daya.

Adapun persamaan model jalurnya adalah:

$$Y_i = 0.116 X_1 + 0.222 X_2 + 0.664 X_3$$

Regresi antar variabel eksogen terhadap variabel endogen lainnya dapat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.

Tabel 1. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
1	.979	.952	.948	.0937

Tabel 2. ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.789	3	1.596	23.737	.000
Residual	3.362	54	.088		
Total	8115	50			

a. Predictors: (Constant), X2, X1.

b. Dependent Variabel: Y

Tabel 3. Coefficients

Model	Unstandardizes Coefficients		Standardizes Coefficients	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	.122	.1.111		.110	.913
Komunikasi	.141	.133	.116	2.057	.003
Sumber Daya	.279	.132	.222	2.115	.004
Struktur Birokrasi	.913	.150	.664	6.076	.000

a. Dependent Variabel: Disposisi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
2	.793	.629	.603	.1302

Tabel 5. ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.439	3	.154	204.399	.000
Residual	.732	54	.019		
Total	1.172	50			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variabel: Y

Tabel 6. Coefficients

Model	Unstandardizes Coefficients		Standardizes Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	1.568	.518		3.025	.000
Komunikasi	.198	.062	.430	3.193	.000
Sumber Daya	.216	.062	.453	3496	.002
Struktur Birokrasi	.121	.070	.261	3.496	.000
Disposisi	.121	.057	.319	2.940	.040

a. Dependent Variabel: Pemberian Tunjangan Profesional

Dari Tabel 5, nilai signifikansi F test sebesar 0,000 ($<0,05$), maka hipotesis nol ditolak dalam artian secara keseluruhan komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), struktur birokrasi (X_3) dan disposisi (Z) mempunyai hubungan linear terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir

Kabupaten Pulang Pisau. Ketiga variabel tersebut signifikan mempengaruhi pemberian tunjangan profesi (Y) yang secara bersama ketiga variabel mampu menjelaskan variabel disposisi sebesar 62,9%. (nilai *R square*).

Dari uji hipotesis secara individu di ketahui seperti berikut ini.

1. komunikasi (X_1) mempunyai pengaruh 0,430 dan signifikan pada taraf 5% terhadap Pemberian Tunjangan Profesi (Y).
2. Sumber daya (X_2) mempunyai pengaruh 0,453 karena dalam taraf signifikan 0,05 terhadap pemberian tunjangan profesi (Y).
3. Struktur birokrasi (X_3) mempunyai pengaruh 0,261 karena dalam taraf signifikan 0,05 terhadap pemberian tunjangan profesi (Y).
4. Disposisi (Z) tidak mempunyai pengaruh karena melebihi taraf signifikan 0,05 terhadap pemberian tunjangan profesi (Y) di mana besarnya pengaruh adalah 0,319

2. Besarnya pengaruh tidak langsung X_2 terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau melalui disposisi adalah $0.222 * 0.319 = 0.071$.
3. Besarnya pengaruh tidak langsung X_3 terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau melalui Disposisi adalah $0.664 * 0.319 = 0.211$.

Adapun persamaan model jalurnya adalah:

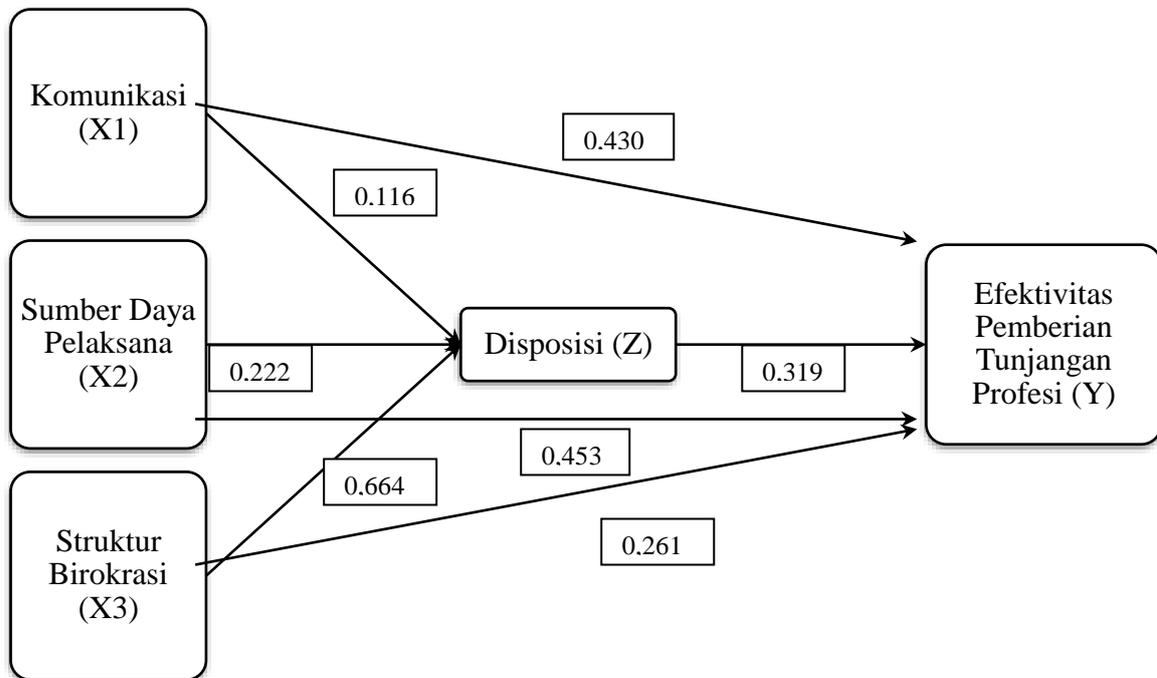
$$Y_i = 0.430 X_1 + 0.453 X_2 + 0.261 X_3 + 0.319 Z$$

Pengaruh tidak langsung variabel komunikasi dan sumber daya tersebut terhadap pemberian tunjangan profesi adalah sebagai berikut ini.

1. Besarnya pengaruh tidak langsung X_1 terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau melalui Disposisi adalah $0.116 * 0.319 = 0.037$.

Penghitungan pengaruh total variabel komunikasi dan sumber daya terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut ini.

1. Pengaruh total Komunikasi terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah $0,430 + 0,037 = 0,547$.
2. Pengaruh total Sumber Daya terhadap Pemberian Tunjangan Profesi Guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau $0,453 + 0,071 = 0,521$.
3. Pengaruh total Struktur Birokrasi terhadap Pemberian Tunjangan Profesi Guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau $0,261 + 0,211 = 0,472$.



Gambar 2. Hasil Penelitian Analisis Jalur Antar Variabel

Tabel 7. Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Variabel Bebas	Nilai t _{-hitung}	Nilai t _{-tabel}	R ²	Probabilitas
X ₁	3.193	2.021	0.198	0.000

Tabel 8. Pengaruh Sumber Daya terhadap Pemberian Tunjangan Profesi

Variabel Bebas	Nilai t _{-hitung}	Nilai t _{-tabel}	r ²	Probabilitas
X ₂	3.496	2.021	0.216	0.000

Tabel 9. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Variabel Bebas	Nilai t _{-hitung}	Nilai t _{-Tabel}	r ²	Probabilitas
X ₃	1.940	2.021	0.121	0.000

Dari hasil penelitian analisis jalur antar variabel dapat digambarkan pada Gambar 2. Pengaruh komunikasi terhadap pemberian tunjangan profesi guru dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7, variabel komunikasi (X₁) yang mempunyai nilai t_{-hitung} > nilai t_{-tabel} = 3,193 > 2,021 berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5%) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Apabila dilihat dari t_{-hitung} variabel bebas maka variabel komunikasi (X₁) yang memiliki t_{-hitung} 3,193 lebih besar dari t_{-tabel} sebesar 2,021 dengan probabilitas 0,000 dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor komunikasi yang mempunyai pengaruh terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau terbukti.

Koefisien regresi faktor komunikasi (X₁) adalah sebesar 0,198. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan pemberian tunjangan profesi guru (Y) SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau artinya apabila faktor komunikasi (X₁) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan maka pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat dengan baik. Angka R² adalah 0,198, artinya bahwa kontribusi faktor komunikasi terhadap pemberian tunjangan

profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah 19,8%, dengan catatan faktor lain adalah konstan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dijadikan alat komunikasi pada SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau memberikan kontribusi pengaruh terhadap pemberian tunjangan profesi guru. Oleh karena itu, apabila komunikasi dijalankan dengan baik dan benar dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dan bawahannya.

Pengaruh sumber daya terhadap pemberian tunjangan profesi guru dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8, variabel sumber daya mempunyai nilai t_{-hitung} > nilai t_{-tabel} berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5%) tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Nilai t_{-hitung} untuk sumber daya 3,496 > t_{-Tabel} sebesar 2,021 dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih dari $\alpha = 0,05$ atau lebih kecil dari taraf nyata 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sumber daya (X₂) terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah signifikan.

Koefisien regresi sumber daya (X₂) adalah sebesar 0,216. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan pemberian tunjangan profesi guru (Y). Artinya, apabila faktor sumber daya sesuai de-

ngan penghargaan yang diinginkan maka pemberian tunjangan profesi guru (Y) SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat dengan baik. Angka R^2 untuk faktor nilai adalah 0.216 artinya bahwa kontribusi sumber daya terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah 21,6%, dengan catatan faktor lain adalah konstan. Dengan demikian adanya sumber daya belum dapat memberikan pemberian tunjangan profesi yang baik bagi guru.

Pengaruh struktur birokrasi terhadap pemberian tunjangan profesi guru dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa dari variabel disposisi (X_3) yang mempunyai nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{Tabel} = 1.940 < 2.021$ berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5 %) tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Pengaruh struktur birokrasi terhadap pemberian tunjangan profesi guru dapat dilihat pada Tabel 9. Apabila dilihat dari t_{hitung}

variabel bebas maka variabel Disposisi (X_3) yang memiliki t_{hitung} 1,940 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,021. Dengan probabilitas 0,000 dapat dikatakannya bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor disposisi yang mempunyai pengaruh terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tidak terbukti.

Koefisien regresi faktor struktur birokrasi (X_3) adalah sebesar 0,121. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan pemberian tunjangan profesi guru (Y). Artinya, apabila faktor struktur birokrasi (X_3) dilaksanakan sesuai dengan pendidikan dan pelatihan maupun jabatan yang diperoleh, maka pemberian tunjangan profesi guru (Z) akan meningkat dengan baik. Angka R^2 untuk faktor internal adalah 0,121. Artinya, kontribusi faktor pemberian tunjangan profesi terhadap pemberian tunjangan profesi guru adalah 12,1%, dengan catatan faktor lain adalah konstan.

Tabel 10. Perbandingan antara Pengaruh Komunikasi terhadap Disposisi

Variabel Bebas	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{Tabel}	r^2	Probabilitas
X_1	2.057	2.021	0.141	0.003

Tabel 11. Pengaruh Sumber Daya terhadap Disposisi

Variabel Bebas	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	R^2	Probabilitas
X_2	2.115	2.021	0.279	0.004

Tabel 12. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Disposisi

Variabel Bebas	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	R^2	Probabilitas
X_3	2.127	2.021	0.913	0.004

Tabel 13. Pengaruh Disposisi terhadap Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Variabel Bebas	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	R^2	Probabilitas
X_3	2.127	2.021	0.121	0.040

Dengan demikian, struktur birokrasi memberikan kontribusi pengaruh terhadap pemberian tunjangan profesi guru. Oleh karena itu, apabila pemberian tunjangan profesi yang telah dilaksanakan tersebut mampu dijalankan dengan baik dan benar dapat dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan kerja yang dianggap lebih efektif.

Pengaruh komunikasi terhadap disposisi dapat dilihat pada Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10, variabel komunikasi (X_1) mempunyai nilai t -hitung $>$ nilai t -Tabel = $2,057 > 2,021$. Artinya, variabel tersebut pada taraf nyata (5%) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan Tabel 10, apabila dilihat dari t -hitung variabel bebas maka variabel komunikasi (X_1) yang memiliki t -hitung $2,057$ lebih besar dari t -tabel sebesar $2,021$ dengan probabilitas $0,003$. Dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor komunikasi yang mempunyai pengaruh terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau terbukti.

Koefisien regresi faktor komunikasi (X_1) adalah sebesar $0,141$. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan Disposisi (Z) SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Artinya, apabila faktor komunikasi (X_1) dilaksanakan sesuai dengan dengan dibutuhkan, maka disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat dengan baik. Angka R^2 adalah $0,141$ yang artinya bahwa kontribusi faktor Komunikasi terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah $14,1\%$, dengan catatan faktor lain adalah konstan.

Dengan demikian, komunikasi yang diberikan pada SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau memberikan kontribusi pengaruh terhadap disposisi. Oleh karena itu, apabila komunikasi dijalankan dengan baik dan benar dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dan bawahannya.

Berdasarkan Tabel 11, variabel sumber daya yang mempunyai nilai t -hitung $>$ nilai t tabel berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5%) tidak mempunyai pengaruh yang

bermakna terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Nilai t -hitung untuk Sumber Daya $2,115 >$ t -tabel sebesar $2,021$ dengan probabilitas sebesar $0,001$ lebih kurang baik dari $\alpha = 0,05$ atau lebih kecil dari taraf nyata 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sumber daya (X_2) terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah signifikan.

Koefisien regresi sumber daya (X_2) adalah sebesar $0,279$. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan disposisi (Z). Artinya, apabila faktor sumber daya sesuai dengan yang dijanjikan maka disposisi (Z) SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau akan meningkat dengan baik. Angka R^2 untuk faktor nilai adalah $0,279$. Artinya, kontribusi sumber daya terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah $27,9\%$, dengan catatan faktor lain adalah konstan. Dengan demikian, adanya sumber daya belum dapat memberikan pemberian tunjangan profesi yang baik bagi guru

Berdasarkan Tabel 12, variabel struktur birokrasi (X_3) mempunyai nilai t -hitung $>$ nilai t tabel = $2.127 > 2.021$. Artinya, variabel tersebut pada taraf nyata (5 %) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Apabila dilihat dari t -hitung variabel bebas maka variabel Struktur Birokrasi (X_3) yang memiliki t -hitung 2.127 lebih besar dari t tabel sebesar $2,021$. Dengan probabilitas $0,004$ dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor disposisi yang mempunyai pengaruh terhadap disposisi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau terbukti.

Koefisien regresi faktor struktur birokrasi (X_3) adalah sebesar $0,913$. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan pemberian tunjangan profesi (Z). Artinya, apabila faktor disposisi (X_3) dilaksanakan sesuai pembinaan yang diberikan, maka pemberian tunjangan profesi (Z) akan meningkat dengan baik. Angka R^2 untuk faktor internal adalah $0,913$. Artinya, kontribusi faktor pemberian tunjangan profesi terhadap

disposisi guru adalah 91,3 %, dengan catatan faktor lain adalah konstan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi memberikan kontribusi pengaruh terhadap disposisi. Oleh karena itu, apabila Pemberian tunjangan profesi yang telah dilaksanakan tersebut mampu dijalankan dengan baik dan benar dapat dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan kerja yang dianggap lebih efektif.

Berdasarkan Tabel 13, variabel disposisi (Z) yang mempunyai nilai $t_{\text{hitung}} >$ nilai $t_{\text{Tabel}} = 2,127 > 2,021$, berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5%) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Apabila dilihat dari t_{hitung} variabel bebas maka variabel Disposisi (Z) yang memiliki t_{hitung} 2,127 lebih besar dari t_{Tabel} sebesar 2,021 dengan probabilitas 0,004 dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor disposisi yang mempunyai pengaruh terhadap pemberian tunjangan profesi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau terbukti.

Koefisien regresi faktor disposisi (Z) adalah sebesar 0,121. Hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan pemberian tunjangan profesi guru (Y). Artinya, apabila faktor disposisi (X_3) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja maka pemberian tunjangan profesi guru (Z) akan meningkat dengan baik. Angka R^2 untuk faktor internal adalah 0,121. Artinya, kontribusi faktor pemberian tunjangan profesi terhadap pemberian tunjangan profesi guru adalah 12,1%, dengan catatan faktor lain adalah konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi memberikan kontribusi pengaruh terhadap pemberian tunjangan profesi guru. Oleh karena itu, apabila pemberian tunjangan profesi yang telah dilaksanakan tersebut mampu dijalankan dengan baik dan benar dapat dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan kerja yang dianggap lebih efektif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variabel komunikasi dan sumber daya mempengaruhi disposisi guru. Pemberian tunjangan profesi bukan suatu konsep tunggal. Lebih dari itu seseorang dapat secara relatif dalam menunjukkan prestasinya dengan

satu aspek pekerjaannya dan dibuat tidak puas dengan satu atau berbagai aspek. Dalam pandangan yang hampir sama, bahwa pemberian tunjangan profesi adalah suatu kondisi emosional yang positif dan menyenangkan sebagai hasil dari penilaian pekerjaan atau pengalaman pekerjaan seseorang. Hal ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh peneliti yakni adanya pengaruh antara komunikasi dan birokrasi yang terstruktur dalam kebijakan terhadap disposisi maupun motivasi berprestasi guru SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang sama menghasilkan nilai positif walaupun dari besarnya pengaruh berbeda satu sama lainnya. Namun demikian, terlihat bahwa komunikasi dan kompensasi non finansial terhadap pemberian tunjangan profesi guru menunjukkan adanya saling keterkaitan satu sama lainnya bahwa kedua variabel yang dijadikan indikator penelitian secara bersama-sama memiliki kontribusi yang besar dalam penelitian yang dilakukan.

Manajemen kompetensi adalah proses pengelolaan kompetensi guru yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan kompetensi, pengembangan dan konseling kompetensi, serta pengambilan keputusan kompetensi. Manajemen kompetensi melibatkan semua pihak termasuk guru yang bersangkutan dengan unit tempat si guru bekerja, dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajemen kompetensi mencakup area kegiatan yang sangat luas. Dalam penulisan ini tahapan yang akan dibahas adalah tentang perencanaan dan pengembangan kompetensi.

Perencanaan sumber daya adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu guru maupun oleh organisasi berkenaan dengan sumber daya guru, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang guru untuk mencapai tujuan kompetensi tertentu. Yang perlu digarisbawahi, perencanaan kompetensi guru harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu guru yang bersangkutan dan organisasi. Jika tidak, maka perencanaan kompetensi guru tidak akan menghasilkan rencana yang baik dan realistis.

Pengembangan kompetensi adalah proses mengidentifikasi potensi kompetensi guru, dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi

tersebut. Secara umum, proses pengembangan kompetensi dimulai dengan mengevaluasi kinerja guru. Proses ini lazim disebut sebagai pemberian tunjangan profesi (*performance appraisal*). Dari hasil penelitian kinerja ini kita mendapatkan masukan yang menggambarkan profil kemampuan guru (baik potensinya maupun kinerja aktualnya). Dari masukan inilah kita mengidentifikasi berbagai metode untuk mengembangkan potensi yang bersangkutan..

Salah satu tujuan pentingnya dari organisasi dinamis dimanapun adalah memastikan bahwa orang-orang mampu melaksanakan bermacam-macam tugas yang berkaitan dengan kedudukan dan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi harus peka terhadap kemampuan dan keahlian guru. Oleh karena itu, perlu diadakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sehingga mengakibatkan pengembangan kompetensi guru akan terpenuhi tersebut. Melalui pemberian tunjangan profesi guru akan membantu guru dalam meningkatkan kebutuhan kompetensi internal mereka sendiri. Dengan pemberian tunjangan profesi ini dapat diketahui ciri-ciri positif dan negatif yang ada pada diri seseorang untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja, baik dengan menggunakan ciri-ciri positif sebagai modal maupun dengan usaha yang sistematis untuk menghilangkan atau paling sedikit mengurangi ciri-ciri negatif.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Pengaruh komunikasi terhadap disposisi implementasi kebijakandi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.
2. Pengaruh sumber daya terhadap disposisi implementasi kebijakan di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.
3. Pengaruh struktur birokrasi terhadap disposisi implementasi kebijakandi SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.

4. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.
5. Pengaruh sumber daya terhadap implementasi pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.
6. Pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.
7. Pengaruh disposisi terhadap implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan.

Memperhatikan kesimpulan penelitian ini, akhirnya dapat dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dengan uraian sebagai berikut ini.

1. Perlu adanya komunikasi untuk menambah motivasi kerja guru, karena dengan adanya komunikasi berarti akan memberikan keyakinan terhadap pemenuhan guru yang berkualitas yang baik untuk menutupi kekurangan-kekurangan dilihat dari segi jabatannya.
2. Hendaknya sumber daya perlu ditekankan dengan lebih memberikan penghargaan khususnya non material menghadapi globalisasi dan modernisasi dapat menjaga tugas yang diemban dengan tanggung jawab yang baik.
3. Hendaknya struktur birokrasi perlu diperhitungkan mengingat masing-masing guru memiliki kebutuhan pendidikan yang tak ternilai sehingga memerlukan struktur birokrasi secara langsung baik berupa material maupun imaterial.
4. Perlu adanya disposisi sehingga dapat meningkatkan keterampilan kerja sehingga berjalan lancar dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC .

- Sugiharto, Manajemen Keikhlasan Abaikan Administrasi, Suara Merdeka, 26 Februari 2010
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*
- Wahab, Solichin Abdul, 2011, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.